

ABSTRAK

Pemenuhan hak pekerja atas jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia masih menunjukkan kesenjangan antara ketentuan yang berlaku dengan pelaksanaannya di lapangan. Hal ini terlihat dari jumlah pekerja yang mencapai sekitar 145,77 juta orang, sementara peserta BPJS ketenagakerjaan hanya sekitar 39,7 juta orang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih banyak pekerja yang belum memperoleh perlindungan sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak pekerja atas jaminan sosial ketenagakerjaan dalam hubungan kerja di Kota Semarang serta kendala dan upaya dalam mengatasi kendala yang ada.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah *yuridis empiris* dengan spesifikasi penelitian *deskriptif analitis*. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pengawas ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, dengan wilayah penelitian difokuskan pada Kota Semarang. Selain itu, digunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa literatur buku, jurnal, dan dokumen resmi yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak pekerja atas jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Semarang belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman pekerja, rendahnya kesadaran hukum perusahaan, faktor ekonomi perusahaan, ketidaktertiban administratif, serta keterbatasan pengawasan dari instansi terkait. Untuk mengatasi kendala tersebut dilakukan berbagai upaya, seperti peningkatan pengawasan dan pembinaan, pelaksanaan sosialisasi, penguatan koordinasi lintas instansi, serta penegakan hukum yang lebih tegas agar perlindungan pekerja dapat terlaksana secara efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Pekerja, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Hubungan Kerja, Pemenuhan Hak